

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangnya melalui penguasaannya (*control*) monopolistik terhadap kekuasaan yang sah (Budiardjo, 2008: 49). Salah satu unsur terpenting dari suatu negara adalah warga negara, di samping terdapat wilayah dan pemerintahan. Menurut Cholisin (2013: 1) warga negara merupakan keanggotaan seseorang dari institusi politik yang namanya negara. Ia sebagai subjek sekaligus objek dalam kehidupan negaranya. Oleh karena itu seorang warga negara senantiasa akan berinteraksi dengan negara, dan bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan negaranya. Untuk itu warga negara diwajibkan untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara agar terciptanya negara yang demokratis.

Hak merupakan suatu keharusan yang diterima dan kewajiban merupakan tanggung jawab warga negara dalam pelaksanaannya. Seorang warga negara yang bertanggung jawab akan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan hak-kewajibannya sejalan dengan peraturan yang berlaku. Pengembangan tanggung jawab warga negara tidak hanya akan mengurangi perbuatan melanggar hukum akan tetapi juga akan menumbuhkan kembangkan demokrasi dan kepentingan nasional yang lain (Cholisin, 2004: 93). Tanggung jawab warga negara dalam melaksanakan hak- kewajibannya, di samping untuk kepentingan dirinya, juga diarahkan kepada pencapaian kehidupan yang baik yang telah disepakati dalam kehidupan bernegara. Tanggung jawab menjadi suatu yang penting dalam melaksanakan hak- kewajiban, dilakukan menurut aturan main yang berlaku, sehingga

mengurangi perbuatan melanggar hukum dan terarah (tidak asal-asalan), sehingga upaya membangun bangsa dapat semakin mendekati (Cholisin, 2013: 54).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang kewajiban-kewajiban warga negara Indonesia, kewajiban warga negara antara lain:

- 1) Kewajiban di bidang hukum dan pemerintahan, dalam Pasal 27 ayat (1) “Setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
- 2) Kewajiban di bidang pembelaan negara, dalam Pasal 27 ayat (3) “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”,
- 3) Kewajiban di bidang penghormatan hak asasi manusia, dalam Pasal 28J ayat (1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”, Pasal 28J ayat (2) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
- 4) Kewajiban di bidang agama, dalam Pasal 29 ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”.
- 5) Kewajiban di bidang pertahanan dan keamanan negara, dalam Pasal 30 ayat (1) “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”.

- 6) Kewajiban di bidang pendidikan, dalam Pasal 31 ayat (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”.

Beberapa aturan yang erat kaitannya dengan kewajiban di bidang hukum dan pemerintahan, antara lain:

a. Kewajiban Warga Negara dalam Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan yaitu berupa rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Pasal 1 angka 1 dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan).

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa kependudukan yang dimaksud antara lain adalah perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting antara lain, kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap

peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencacatan sesuai dengan ketentuan undang-undang (Burhanudin, 2008: 1).

Pencatatan administrasi kependudukan berupa identitas diri merupakan syarat penting bagi warga negara. Undang-undang yang mengatur bahwa warga negara berkewajiban mempunyai identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk yang terdapat dalam Pasal 63 ayat (1) yang menjelaskan bahwa warga Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP-el (Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan).

Pencatatan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) merupakan kewajiban setiap warga negara yang tertera dalam Pasal 51 ayat (1), dan 11 ayat (1) bahwa setiap terjadi peristiwa kelahiran maupun susunan keluarga atau bisa disebut kartu keluarga, warga negara wajib mencatatkan serta melaporkan kepada instansi pelaksana melalui kepala desa/lurah. Pada Pasal 67 ayat (1) warga negara wajib mencatatkan perkawinannya kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang nantinya akan dicantumkan dalam Akta Nikah (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil).

b. Kewajiban Warga Negara untuk Beragama/BerkeTuhanan

Kewajiban warga negara dalam memeluk agama yang mereka yakini merupakan suatu keharusan bagi warga negara, sebab itu pemerintah membuat peraturan dalam memeluk agama dengan memberikan kebebasan pada seseorang untuk memilih agama yang ketentuannya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kewajiban warga negara dalam beragama diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 29 ayat (2), dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal

22 ayat (1), yang menjelaskan bahwa warga negara bebas memeluk agamanya yang mereka yakini serta negara menjamin kemerdekaan tiap warga negara atau penduduk dalam memeluk agamanya masing-masing.

Berbagai aturan yang telah dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun pada kenyataannya, pelanggaran kewajiban sebagai warga negara masih terjadi di masyarakat, seperti penolakan pembuatan identitas dari negara dan tidak memeluk agama resmi yang ada di Indonesia. Pelanggaran kewajiban sebagai warga negara dalam bidang administrasi kependudukan dan agama yang dilakukan oleh masyarakat *Suku Dayak* Losarang di Kabupaten Indramayu.

Di Kabupaten Indramayu terdapat komunitas/sekelompok masyarakat yang disebut atau dikenal dengan sebutan *Suku Dayak Hindu-Budha Bumi Segandu* atau orang Indramayu menyebutnya sebagai *Suku Dayak* Losarang, *Suku Dayak* ini terletak di Jalan Pantura yang tepatnya di daerah Desa Krimun Kecamatan Losarang. *Suku Dayak* ini terletak dan tinggal di tengah-tengah masyarakat modern tidak seperti suku-suku yang ada di Indonesia yang hidup di pedalaman serta tertutup dan menjauh dari masyarakat luar, *Suku* di Indramayu ini sebenarnya bukan suku bangsa atau etnik melainkan sebutan untuk komunitas *Suku Dayak* Losarang. Kata *Suku*, diambil dari Bahasa daerah Indramayu, *Suku Dayak* Losarang tidak ada hubungannya dengan suku yang ada di Kalimantan (Tarsono, 2014: 41).

Komunitas *Suku Dayak* Losarang berlandaskan pada ajaran *Sejarah Alam Ngaji Rasa*. Ajaran ini menekankan sikap mendahulukan penilaian terhadap diri sendiri sebelum melakukan penilaian terhadap orang lain. *Sejarah Alam Ngaji Rasa* merupakan ajaran

etika yang menjadi sumber segala kebaikan. Dalam pandangan Takmad (Ketua *Suku Dayak* Losarang), *Sejarah Alam Ngaji Rasa* berarti mengkaji perasaan individu untuk sedapat mungkin melepaskan perasaan ke dalam diri pribadi untuk menemukan pengetahuan dan kebenaran (Khaerul, 2016: 41).

Suku Dayak Losarang bukan hanya berlandaskan ajaran *sejarah alam ngaji rasa*, selain itu *Suku Dayak* Losarang berkonsep terhadap alam, namun mereka juga sama seperti masyarakat pada umumnya yang menggunakan alat-alat dan transportasi modern. Seperti *handphone*, sepeda motor bahkan mobil serta alat-alat modern lainnya. Akan tetapi yang membedakan *Suku Dayak* ini dalam menggunakan sepeda motor mereka tidak mentaati peraturan yang ada, yaitu peraturan berlalu lintas dalam berkendara, seperti menggunakan helm, mempunyai surat izin mengemudi (SIM) (Syukron, 2013: 120).

Masyarakat *Suku Dayak* Losarang memiliki aturan sendiri dalam komunitasnya, mereka menolak terikat dengan aturan yang diatur oleh ketentuan agama maupun yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai bagian dari negara Indonesia. Kepercayaan diri mereka dalam menjalani hidup sehari-hari adalah bahwa manusia telah menghendaki itu sendiri. Warga Indonesia berkewajiban memeluk agama dan memiliki bentuk identitas dari pemerintah seperti, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, akta nikah dan akta kematian sebagai syarat untuk mengurus hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang warga negara. Sebaliknya masyarakat *Suku Dayak* Losarang tidak bersedia untuk memiliki identitas dari pemerintah dan menolak untuk beragama. (<http://www.lensaterkini.web.id/2016/03/5-hal-aneh-dalam-komunitas-suku-dayak.html>)

diakses pada tanggal 7 Desember 2016 pukul 10:41 WIB.

Masyarakat *Suku Dayak* Losarang tidak memeluk agama seperti masyarakat pada umumnya, mereka berkeyakinan bahwa alamlah yang mereka percaya. Sebab semua bermula dari alam, bahkan mereka mempunyai ritual-ritual tersendiri, seperti ritual malam jum'at kliwon, ritual pepe, ritual kungkum (berendam) serta ritual ngaula ning anak karo rabi (mengabdikan terhadap anak dan istri). Masyarakat *Suku Dayak* Losarang juga tidak terlibat dalam sistem pemerintahan dan tidak memerlukan bantuan dari pemerintah, bahkan masyarakat *Suku Dayak* Losarang menolak terikat dengan aturan yang dibuat oleh negara baik itu pemerintahan maupun agama. (Aditya, 2015: 61).

Bahkan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Indramayu sudah mengeluarkan fatwa terhadap Komunitas *Suku Dayak* Losarang yang menyatakan bahwa ajaran yang dianut *Suku Dayak* Losarang adalah ajaran sesat. Sebab kepercayaan yang mereka yakini yaitu percaya dengan alam di sekitarnya, serta ritual yang dijalani *Suku Dayak* Losarang bertentangan dengan ajaran Islam dan keberadaannya membuat keanehan serta membuat keresahan bagi umat Islam yang mengganggu ketertiban umum. Ritual-ritual yang dilakukan *Suku Dayak* Losarang yang mengganggu masyarakat sekitar dan masyarakat luar, yang dibuktikan dengan banyaknya anggota *Suku Dayak* Losarang yang berkumpul pada malam Jum'at Kliwon untuk melakukan ritual yang anggotanya dari luar Desa Krimun sehingga warga merasa cemas dengan diadakannya ritual tersebut. (Telaah dan Kajian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Indramayu tentang *Suku Dayak* Losarang (Kelompok Takmad dan ajarannya. Muikabindramayu.blogspot.co.id/ diakses pada 7 Desember 2016 pukul 20:02 WIB).

Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam hal ini sudah memberikan pelayanan publik, seperti pelayanan administrasi kependudukan dan agama kepada

masyarakat *Suku Dayak* Losarang. Namun masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu menolak bantuan maupun layanan yang diajukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indramayu (Nuhrison, 2012: 109). Bukan hanya itu Pemerintah Daerah yang melakukan pembinaan dengan membentuk Badan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yang diketuai oleh Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu. Badan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) sudah mengeluarkan surat larangan atau pembekuan terhadap kelompok *Suku Dayak* Losarang Indramayu, namun sampai sekarang kelompok *Suku Dayak* Losarang masih tetap berjalan (Khaerul, 2016: 43). Akan tetapi sejauh ini belum pernah terpublikasikan, karena masyarakat luar belum tahu usaha yang dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa terkait dengan pembinaan terhadap masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu.

Melaksanakan hak dan kewajiban dalam bidang administrasi kependudukan dan agama merupakan kewajiban bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Walaupun masyarakat *Suku Dayak* Losarang merasa “eksklusif” yang berbeda dari masyarakat pada umumnya, masyarakat *Suku Dayak* Losarang adalah warga negara yang wajib bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya untuk mematuhi aturan hukum dan agama. Dengan adanya permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, membuktikan bahwa masyarakat *Suku Dayak* Losarang melanggar kewajibannya sebagai warga negara yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Neagara Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan adanya ketidaksesuaian dengan aturan hukum dan agama, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pelanggaran kewajiban sebagai warga negara yang dilakukan oleh masyarakat *Suku Dayak* Losarang Kabupaten Indramayu.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat *Suku Dayak* Losarang tidak melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam bidang hukum dan agama.
- b. Pemerintah Desa sudah melakukan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat *Suku Dayak* Losarang tetapi belum terpublikasikan dan belum optimal hasilnya.
- c. Masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu meresahkan warga lainnya.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah melalui beberapa uraian di atas, maka dalam hal ini permasalahan yang dikaji perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan untuk memfokuskan perhatian pada permasalahan yang merupakan bidang kajian Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk selanjutnya peneliti membatasi penelitian ini tentang:

1. Masyarakat *Suku Dayak* Losarang yang tidak melakukan kewajibannya sebagai warga negara dalam bidang hukum dan pemerintahan yang pada dasarnya setiap warga negara wajib mematuhi hukum dan pemerintahan karena mematuhi hukum dan pemerintahan merupakan suatu tuntutan atau kewajiban bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
2. Masyarakat *Suku Dayak* Losarang yang tidak melakukan kewajibannya sebagai warga negara dalam bidang agama/berkeTuhanan yang seharusnya setiap warga negara diwajibkan untuk percaya akan pencipta-Nya dan memeluk agama yang mereka yakini sebagai pedoman hidup.
- 3.

D. Perumusan Masalah

Sesuai dengan pembatasan masalah sebelumnya maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Mengapa masyarakat *Suku Dayak* Losarang melanggar kewajibannya sebagai warga negara?
- b. Bagaimana upaya pembinaan terhadap masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu?
- c. Apa saja hambatan dalam membina masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan alasan *Suku Dayak* Losarang melanggar kewajibannya sebagai warga negara.
- b. Untuk mendeskripsikan upaya dalam membina masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu.
- c. Untuk mendeskripsikan hambatan dalam membina masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul **“Pelanggaran Kewajiban Warga Negara Oleh Masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu”** ini diharapkan akan membuahkan manfaat positif, baik manfaat secara teoretis maupun manfaat secara praktis, manfaat-manfaat tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya bidang Ilmu Kewarganegaraan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dalam Pendidikan Kewarganegaraan, salah satu yang dipelajari adalah kewajiban sebagai warga negara. Maka penelitian ini semoga memberi manfaat khususnya pada warga negara. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sumber acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang relevan dengan penelitian ini terutama penelitian yang bertujuan dalam rangka pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya mengenai kewajiban sebagai warga negara.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengetahui pelanggaran kewajiban sebagai warga negara dengan meneliti pelanggaran kewajiban warga negara oleh masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu. Penelitian ini merupakan upaya peneliti dalam meningkatkan pengetahuan tentang kewajiban warga negara sehingga peneliti dapat memiliki bekal dalam menjalani kehidupan berwarganegara dan bermasyarakat sebagai warga negara dan guru Pendidikan Kewarganegaraan.

2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya kewajiban dalam mencatatkan identitas dari pemerintah dan memeluk agama demi terciptanya warga negara yang cerdas (*good citizen*).

3) Bagi Masyarakat *Suku Dayak* Losarang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat *Suku Dayak* Losarang sebagai warga negara khususnya dalam hal kehidupan bernegara. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara negara dan masyarakat serta dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

4) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan refleksi bagi pemerintah daerah Indramayu sebagai lembaga yang memimpin daerah otonom khususnya dalam mengatur dan mengurus serta mengawasi masyarakat pada tingkat daerah. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat yang dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

G. Batasan Istilah

Berdasarkan judul penelitian **Pelanggaran kewajiban warga negara oleh masyarakat *Suku Dayak* Losarang Indramayu**. Penjelasan istilah dilakukan untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda dari judul penelitian ini maka peneliti memberikan paparan tentang batasan istilah, antara lain:

a. Pelanggaran

Menurut Moeljanto (2008: 63) bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Undang-Undang menentukan demikian. Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah perilaku yang tidak sesuai yang dilakukan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan

peraturan yang sudah dibuat. Pelanggaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelanggaran dalam bidang hukum, yang dilakukan oleh *Suku Dayak* Losarang.

b. Kewajiban Warga Negara

Cholisin (2004: 92) mengemukakan bahwa kewajiban warga negara merupakan aspek dari tanggung jawab warga negara (*citizen responsibility/civic responsibilities*) yang merupakan hak (*right*) dan kewajibannya (*duty*) sebagai warga negara yang bersedia menanggung akibat atas pelaksanaannya tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban warga negara adalah aspek dari tanggung jawab warga negara terhadap negara (*citizen respon*).

Beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan warga negara pada bidang hukum antara lain:

- 1) Kewajiban dalam administrasi kependudukan
- 2) Kewajiban dalam beragama.

c. Masyarakat *Suku Dayak* Losarang

Masyarakat *Suku Dayak* Losarang merupakan komunitas/sekelompok masyarakat yang disebut atau dikenal dengan sebutan *Suku Dayak* Losarang yang berada di Kabupaten Indramayu.

d. Badan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)

Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) merupakan badan organisasi yang mengawasi tentang aliran kepercayaan atau aliran kebatinan yang mencakup aliran keagamaan, kepercayaan-kepercayaan budaya, dan mistik

kejawan yang bertujuan untuk melindungi agama dan praktik beragama yang berkembang di masyarakat dan melindungi setiap keyakinan agama dan praktik yang dilakukan pengikutnya (Armawansyah, 2013: 2).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pengawasn Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) merupakan suatu badan pengawasan yang mengawasi aliran kepercayaan yang ada di daerah-daerah untuk mengawasi dan meminimalisir kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara dari ajaran ataupun aliran yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

- e. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu ini merupakan salah satu perangkat organisasi Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu yang bekerja dengan cara-cara LSM dan mendapatkan mandate untuk menyelenggarakan program kajian, penelitian, pendidikan, penerbitan dan dokumentasi NU, dan menggali potensi warga NU, menghimpun database, mendorong terciptanya jam'iyah ijtimaiah dalam rangka khidmat NU, Lakpesdam sendiri sebagai laoratorium kader dan kawah candradimuka yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dan demokratis.